

Penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) terhadap Efektifitas dan Efisiensi Kinerja di Diskominfo Kabupaten Semarang

Annis Muziza

Universitas Tidar

muzizaannis@gmail.com

Siti Afidatul Khotijah

Universitas Tidar

khotijah_afi@untidar.ac.id²

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana bentuk pengaruh dari penerapan sistem informasi akuntansi terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan sistem yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang (Diskominfo Kabupaten Semarang). Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif, dalam proses perolehan datanya melalui observasi dan praktik langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menetapkan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dapat menjalankan pekerjaannya secara efektif dan efisien sehingga menambah nilai positif bagi kinerja mereka.

Kata Kunci *Sistem informasi perencanaan pembangunan (SIPPD), efektifitas dan efisien, DISKOMINFO Kabupaten Semarang.*

I. PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang banyak dibahas oleh kalangan, baik itu sistemnya, tata caranya, maupun perkembangannya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri ini meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD,

digunakan sebagai guna meminimalisir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Standar akuntansi yang mengaturnya yaitu standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Seiring dengan berkembangnya zama organisasi pemerintahan merupakan organisasi yang kompleks dan setiap satuan kerja menyusun laporan keuangan maka diperlukan alat bantu agar dapat memudahkan dalam pelaksanaan dan pelaporan serta perencanaan dan pembangunan daerah dapat selaras dan seirama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sistem informasi yang digunakan guna alat bantu sudah ada dan sudah digunakan, sistem tersebut dinamakan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat beberapa hasil penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi dari penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Grandis, 2019) menunjukkan bahwa efektifitas sistem e-planning program pembangunan daerah di BAPPEDA Kota Banjar menunjukkan bahwa sebagian besar ketercapaian pengusulan program kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dilakukan dengan baik. Keefektifitasan tersebut tampak bahwa keuntungan usulan sistem e-planning terkunci dan terdokumentasikan berupa softcopy, mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam meng-input data sehingga adanya pengurangan biaya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jamal, Anam & Dijirimu (2016) menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sangat membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dalam proses perencanaan pembangunan serta menyediakan dokumen perencanaan secara cepat, akurat dan berkualitas. Hasil wawancara yang dilakukan, terdapat perbedaan kinerja yaitu sebelum penggunaan SIPPD, proses perencanaan pembangunan belum berjalan optimal dan setelah penggunaan SIPPD, mengalami perubahan sehingga mampu menjalankan berbagai proses perencanaan pembangunan dengan baik.

Penelitian diatas mengarah ke-efektifan penggunaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Pada penelitian ini juga ingin mengetahui ke-efektifan namun juga ingin mengetahui efisiensi atas sistem tersebut yang diterapkan pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang akan tetapi metode yang dilakukan pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, pada penelitian sebelumnya metode dilakukan dengan cara survey dan pemberian angket, dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan praktik langsung. Selain itu penelitian ini dilakukan dengan alasan masih sedikit penelitian yang mengangkat tema tentang sistem informasi ini apalagi di daerah Kabupaten Semarang ini. Tujuan utama dari adanya sistem akuntansi daerah adalah salah satunya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Alasan utama dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) akan efektif dan efisien bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

II. LANDASAN TEORI

A. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah atau SIPPD adalah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang merupakan suatu sistem yang diharapkan mampu memaduserasikan dan mensinkronkan program prioritas Pembangunan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) aplikasi tersebut dipergunakan untuk mempermudah pengelolaan data perencanaan daerah dan aplikasi ini hanya dapat digunakan oleh orang tertentu yang memiliki akses untuk logi yang telah diberikan dan setiap user memiliki tingkatan akses yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Semua format data dalam aplikasi ini mengacu pada UU dan peraturan yang berlaku.

Sifat dasar dari SIPPD adalah data sentris atau terpusat. Jadi sebaiknya menggunakan sebuah server untuk mengelola semua data klien secara terpusat sehingga tidak perlu sinkronisasi data. Aplikasi ini juga bisa diakses melalui internet jika server aplikasi mendukung untuk diakses dari internet. Untuk menjalankan aplikasi ini tidak membutuhkan spesifikasi komputer khusus karena sudah kompetibel dengan semua device yang memiliki browser internet. Ruang lingkup aplikasi SIPPD itu sendiri yaitu meliputi, modul RPJMD, modul Renstra SKPD, modul Perencanaan, dan modul Penganggaran. Modul RPJMD merupakan modul yang dapat menghasilkan format data-data profil daerah dalam rangka mempermudah penyusunan RPMJD. Sedangkan modul Renstra SKPD adalah modul yang memberikan panduan bagaimana memfasilitasi proses penyusunan rencana strategi SKPD dengan dilengkapi penjelasan tentang landasan teoritis tentang konsep dan aplikasi dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Modul ini diharapkan nantinya dapat membantu dalam memahami substansi rencana strategi SKPD dan bagaimana proses penyusunan rencana strategi yang disusun sesuai dengan tupoksi, kebutuhan masyarakat, dan tema strategi pembangunan.

B. Akuntansi pemerintahan

Secara umum pengertian akuntansi pemerintahan yaitu aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan negara (public finance), khususnya pada tahap melaksanakan anggaran (budget execution), yang termasuk semua pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang sifatnya permanen ataupun yang hanya seketika pada semua tingkatan dan unit pemerintahan. Menurut (Halim 2002:143) akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Sedangkan menurut Arif (2002:3) akuntansi pemerintahan merupakan aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut. Oleh dari itu suatu akuntansi pemerintahan juga membutuhkan sistem agar dapat mendukung kegiatannya.

Peran akuntansi pemerintahan sebagai pemegang kunci keteraturan data-data finansial negara. Baik terkait dengan pendapatan maupun pengeluaran anggaran yang dimilikinya. Tujuan atau manfaat akuntansi pemerintahan terbagi menjadi 3 yaitu akuntabilitas, manajerial dan pengawasan. Akuntabilitas sendiri memiliki makna bahwa

akuntansi pemerintah dibuat untuk memenuhi berkas laporan pertanggungjawaban keuangan negara, sedangkan manajerial memiliki maksud dengan diterapkannya akuntansi pemerintahan, tindakan memajemen segala kebijakan pemerintah bisa berjalan dengan lancar, dan untuk tujuan pengawasan memiliki maksud bahwa dilakukan akuntansi pemerintah dapat memudahkan pemeriksaan keuangan negara.

C. Efektif dan Efisien

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah efektif berarti memiliki efek (pengaruh, akibat, kesan), mujarab atau manjur (obat), membawa hasil atau berhasil (usaha, tindakan) dan mulai berlaku. Jadi pengertian efektif dapat dijabarkan sebagai suatu pekerjaan yang bisa diselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai seperti rencana yang sebelumnya ditetapkan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap kegiatan, suatu kegiatan atau program dapat dikatakan efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran sebagaimana hal dari program atau kegiatan itu ditentukan. Efektif juga bisa dikatakan bahwa hal tersebut tepat dengan sasaran dari target atau tujuan dapat dicapai. Prawirosentoso (2008:27) mengatakan bahwa efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan program yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi bisa diartikan sebagai sesuai atau tepat untuk menghasilkan sesuatu tanpa membuang biaya, waktu dan tenaga, dapat menjalankan tugas secara cermat dan tepat, bertepatan guna, berdaya guna. Dengan kata lain pengertian efisiensi ialah segala hal yang diselesaikan dengan berdaya guna. Jadi, bekerja dengan efisien adalah bekerja dan menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat, hemat, tepat dan selamat.

Apabila seseorang berbicara tentang efektifitas sebagai orientasi kerja berarti yang menjadi sorotan perhatian adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah digunakan harus ditentukan sebelumnya dan dengan memanfaatkan sumber-sumber itulah maka hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula. Siagian (2005). Kemudian Streers (2005) mengemukakan ada empat faktor yang mempengaruhi dalam mengukur efektivitas organisasi yaitu: (1) Karakteristik organisasi terdiri dari struktur organisasi dan teknologi struktur adalah cara organisasi untuk menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi; (2) Karakteristik lingkungan mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstren dan lingkungan intern. Lingkungan ekstren yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut-atribut lingkungan saja; (3) Karakteristik lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja; (4) Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan, koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

Jadi efektifitas adalah seberapa besar tingkat kelekatan out put yang dicapai out put yang di harapkan dari sejumlah input. Sesuatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara tepat, efektif, efisien apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan yang telah direncanakan. Kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau

tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2008) yaitu: (1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; (2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan; (3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan; (4) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan; (5) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat; (6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif; (7) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; (8) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian diskriptif dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian ini merupakan penelitian yang memaparkan keadaan objek yang diteliti yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang yang bertempat di Jl. Diponegoro No. 14, Gedung D, UNGARAN-50511. Observasi dan paraktik langsung yang dilakukan untuk pembuatan artikel ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2020. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui metode observasi dan praktik langsung yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan sendiri oleh penulis untuk menjawab penelitiannya. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah tersebut penulis menggunakan teknik studi Pustaka, Observasi, dan Praktik langsung.

IV. HASIL PENELITIAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang berdiri pada 20 Januari 2017, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dinas Komunikasi dan Informatika ini memiliki fungsi menjalin komunikasi dua arah dengan warga tentang kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Mundjirin,2017). Awal mulanya Dinas Komunikasi dan Informarmatika Kabupaten Semarang merupakan suatu instansi gabungan antara Dinas Perhubungan dan Kominfo, namun setelah resmi dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika merangkum fungsi Bagian Humas, Bagian Pengelolaan Data Elektronik (PDE) dan bidang komunikasi dan informatika (kominfo).

Setelah dilakukan penelitian secara langsung di Dinas Komunikasi dan Informatika yang berdasarkan observasi dan praktik langsung mengenai Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dapat dijelaskan bahwa Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Diskominfo Kabupaten Semarang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan berupa proses menginput data hanya bisa dilakukan oleh admin yang memegang password dan username sehingga membantu pekerjaan admin menjadi lebih cepat dan tepat waktu, ketika melakukan input data pada program yang dibuat seperti program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan disiplin aparatur, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan

lain sebagainya. Dengan adanya sistem tersebut menunjukkan bahwasannya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan daerah memudahkan kontrol antara perencanaan dan pelaksanaan dengan tujuan agar konsisten antara perencanaan dan pelaksanaan selalu terjaga. Dengan adanya Sistem Informasi perencanaan pembangunan daerah fungsi pengendalian telah berjalan dengan baik serta mengefektifkan evaluasi terhadap capaian kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang.

Keefektifan dan keefesiensian dengan adanya sistem ini dapat dirasakan saat melakukan pencatatan, evaluasi, dan pengendalian pada renja dan RKPD dimana admin dapat memasukkan data atau melengkapi informasi yang telah disajikan secara online jadi pengisian tersebut bisa dilakukan oleh admin dimana saja dan kapan saja, tidak perlu pada saat dikantor dan di hari kerja. Jika menggunakan sistem ini semua hal yang direncanakan dalam pembangunan daerah sudah tersusun rapi dalam suatu sistem, penyusunan lebih efisien, dan konsistensi data tetap terjaga karena dalam hal ini yang mampu membuka dan menutup sistem hanya admin yang memiliki username dan password. Kaitannya dengan efisiensi. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai bentuk upaya dalam hal penghematan waktu karena sistemnya hanya harus melakukan input data saja.

Berdasarkan penjelasan di atas maka hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh (Grandis, 2019) yang menyatakan bahwa keefektifitas dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sistem akan mengunci dan mendokumentasikan berupa softcopy, mobilitas pegawai yang hemat waktu dalam melakukan input data sehingga adanya pengurangan biaya. Dari penjelasan di atas juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Jamal, Anam, & Ahlis Djirimu, 2016) yang menyatakan bahwa dengan adanya sistem ini akan menambah keefektifan dan keefisien dari kinerja pegawai yang berupa dalam proses perencanaannya akan secara cepat, akurat dan berkualitas dan dengan adanya sistem ini proses perencanaan juga berjalan dengan optimal dan baik hal itu menunjukkan bahwa dengan adanya sistem tersebut kinerja dari pegawai akan menjadi efektif dan efisien karena terbantu oleh Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan tersebut.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Dinas Kominfo Kabupaten Semarang dalam pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dapat membantu kegiatan input data dan akan memberikan efek pada kinerja pegawai yaitu efektivitas dan efisien. Dikatakan efektif dan efisien karena sistem ini memudahkan kontrol antara perencanaan dan pelaksanaan dengan tujuan agar konsisten antara perencanaan dan pelaksanaan selalu terjaga, saat melakukan pencatatan, evaluasi, dan pengendalian pada renja dan RKPD dimana admin dapat memasukkan data atau melengkapi informasi yang telah disajikan secara online jadi pengisian tersebut bisa dilakukan oleh admin dimana saja dan kapan saja, data tetap terjaga karena dalam hal ini yang mampu membuka dan menutup sistem, dan menghemat waktu serta tenaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, B., & Muchlis, A. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- bernard. (2008). *Kebijakan Kinerja Karyawan*. In Prawirosentono, & Suyadi. Yogyakarta: BPFE.
- Grandis, E. T. (2019). Efektivitas penerapan sistem e-planning program pembangunan daerah oleh badan perencanaan dan pembangunan daerah Kota Banjar. *semanticscholar.org*.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jamal, A. L., Anam, H., & Ahlis Djirimu, M. (2016). Kajian Tentang fungsi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) dalam proses perencanaan pembangunan DI Kabupaten Poso. *e-Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 1*.
- krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maghfiroh, N. A., Idris, A., & Jamanie, F. (2017). Efektivitas Sistem Informasi Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Sekeretariat Daerah Kota Bontang. *e-journals.unmul.ac.id*.
- Pemerintahan, K. S. (2020,). *SAP- KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN*. Retrieved from Standar Akuntansi Pemerintahan: www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/
- PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13-FAKULTAS HUKUM UNSRAT*. (2006). Retrieved from PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006.
- Purnomo, D. A. (2017). *Mundjirin Resmikan Kantor Baru Diskominfo Kabupaten Semarang*. Semarang: Tribun Jateng.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian. (2001). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Siagian. (2005). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah SIPPD-RSUDR*. (2014, Desember 24). Retrieved from rsudpurihusada.inhilkab.go.id: <https://rsudpurihusada.inhilkab.go.id/sistem-informasi-perencanaan-pembangunan-daerah-sippd/>
- Steers. (2005). *Efektivitas Organisasi Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- sugi. (2019, Desember 27). *mengenal lebih jauh akuntansi pemerintahan secara lengkap*. Retrieved from accurate.id: <https://accuratecloud.id/2017/10/16/pengertian-standar-akuntansi-pemerintahan/>
- Sugiyono. (2005). *Pengertian Penelitian Kualitatif*.
- Sumpeno, W. (2012). *Modul Pelatihan Penyusunan Renstra SKPD / PUSTAKA RAKYAT*. Retrieved from wahjudinsumpeno.wordpress.com: <https://wahjudinsumpeno.wordpress.com/modul-pelatihan-penyusunan-renstra-skpd/>